

Telaah kritis manajemen keuangan pemerintah DKI Jakarta dan Surabaya

Abu Bakar

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi,
Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957

Email: abubakar00012248@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif tujuan mengetahui dan membandingkan kinerja keuangan daerah pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemda Kota Surabaya dalam hal: 1) kemandirian keuangan daerah, 2) efektivitas, 3) efisiensi, 4) keserasian dan pertumbuhan. Hasil analisis menunjukan kinerja keuangan untuk Kemandirian menunjukan skor 22 sementara untuk Pemda Surabaya hanya 13. Untuk Aktivitas keuangan Pemda Surabaya lebih baik dari pada Pemda DKI Jakarta dengan skor masing-masing 29 dan 19. Untuk Efisiensi penggunaan keuangan Pemda DKI lebih baik dari pada Surabaya dengan perbandingan 17 banding 9. Sementara untuk keserasian memperlihatkan Pemda Surabaya Juah lebih baik dari pada DKI Jakarta dengan perbandingan 25:13 dan dari sisi pertumbuhan keseluruhan memperlihatkan bahwa pertumbuhan dalam lima tahun pemda Surabaya jauh sedikit diatas pemda DKI Jakarta dengan perbandingan 12 berbanding 14 dan secara agregat Pemda Surabaya lebih baik daripada Pemda DKI Jakarta dengan skor 18 berbanding 16,6.

Kata Kunci: Manajemen Keuangan, Kinerja keuangan, Keuangan Daerah

Abstract

This study uses a descriptive method with the aim of knowing and comparing the regional financial performance of the DKI Jakarta Provincial Government and the Surabaya City Government in terms of: 1) regional financial independence, 2) effectiveness, 3) efficiency, 4) harmony and growth. The results of the analysis show that the financial performance for Independence shows a score of 22 while for the Surabaya Regional Government it is only 13. For financial activities, the Surabaya Regional Government is better than the DKI Jakarta Regional Government with scores of 29 and 19 respectively. a comparison of 17 to 9. Meanwhile, for compatibility, the local government of Surabaya is much better than DKI Jakarta with a ratio of 25:13 and in terms of overall growth, it shows that the growth in five years of the local government of Surabaya is far slightly above the regional government of DKI Jakarta with a ratio of 12 to 14 and in aggregate The local government of Surabaya is better than the local government of DKI Jakarta with a score of 18 to 16.6.

Keywords: Financial Management, Financial Performance, Regional Finance

Pendahuluan

Setiap kepala daerah memiliki gaya dalam manajemen keuangan karena dipengaruhi banyak faktor. Ada yang berorientasi pada kinerja (Kusnandar and Siswanto 2018, 5) atau pada kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya (Akbar 2016, 37) atau juga mengedepankan pada kualitas laporan keuangan yaitu memegang prinsip tepat waktu dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. (Mole 2015, 1059) Pendek kata pengelolaan keuangan merupakan tantangan yang tidak ringan karena harus menerapkan peraturan yang ada, (Mole 2015, 160) mengurangi ketergantungan pada DAU, (Rinaldi 2012, 110) digali dari pada potensi daerah sendiri, (Akbar 2016, 35) transparan, jujur, demokratis dan efektif, efisien dan akuntabel, (Mutihah 2016, 108) dan kemandirian keuangan (Fazlurahman, Fatriananda, and Jauhari 2020, 59)

Anis Baswedan sebagai Gubernur dan Risma Sebagai Walikota Surabaya (masih menjabat ketika laporan keuangan di sajikan) memiliki gaya dan kebijakan keuangan daerah yang berbeda yang terlihat dari laporan keuangan yang disajikan setiap tahun. Itulah sebabnya riset ini dilakukan sampai tahun 2019. Dalam pertanggungjawaban keuangan kedua daerah memiliki kualitas yang sama versi Badan Pemeriksa Keuangan dengan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana kota Bitung (Mole 2015, 160) tahun 2015, Kabupaten Badung tahun 2014 (Kurniati 2016) dan kabupaten Musi Rawas (Kartoprawiro and Susanto 2018, 2) . Hanya saja yang membedakan keduanya adalah besarnya kualitas keuangan untuk masing-masing pengukuran tidak pernah sama. Kualitas kinerja keuangan daerah akan terlihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh setiap pemerintah daerah mulai dari pendapatan hingga posisi surplus atau defisit.

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu indikator pengukuran keberhasilan otonomi daerah (Mutihah 2016, 108) yang di lakukan dengan penentuan langkah-langkah spesifik untuk pengukuran keberhasilan suatu organisasi (Fazlurahman, Fatriananda, and Jauhari 2020, 58) dan upaya menilai efisiensi dan efektivitas perusahaan (Profitabilitas et al. 2022) (Hasibuan and Fatoni 2022, 65). Oleh karenanya pemda dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berpedoman pada sistim akuntansi pemerintahan (Urip Santoso 2008, 17). Tujuan penyajian Laporan keuangan pemda salah satunya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi (Hidayat 2016,5) sesuai. UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta UU No. 25 tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah" merupakan melimpahkan kewenangan pembangunan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan pengelolaan sumber daya keuangan secara efisiensi dan efektivitas. Untuk itu di perlukan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan handal serta mampu menggambarkan Performa keuangan daerah tersebut (Gede 2016;75).

Pembiayaan daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerja lainnya guna memenuhi pelayanan publik yang telah disahkan oleh lembaga eksekutif. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menentukan aspek prioritas pada aspek tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah. APBD merupakan suatu tolok ukur yang mampu menggambarkan keberhasilan daerah dalam meningkatkan perekonomian dalam menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki suatu daerah. Artinya, jika perekonomian daerah

mengalami kenaikan, maka akan berdampak terhadap kenaikan pendapatan suatu daerah (PAD) secara positif (Setia 2008;5) karena didalamnya terlihat dan terungkap serta tercatat semua bentuk penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.(Harahap 2020,5)

DKI Jakarta dan Surabaya adalah dua kota yang bisa dijadikan tolak ukur atau barometer dalam penyajian laporan keuangan yang memenuhi Standar Pelaporan Keuangan karena "Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti rekomendasi, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," untuk yang keempat kali secara berturut-turut (Compas.Com) sementara Surabaya memiliki prestasi yang lebih baik dari pada DKI Jakarta dengan sembilan kali mendapat opini yang sama secara berturut-turut.(suara Surabaya) Hanya yang perlu dipahami tidak selalu laporan keuangan dengan opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi yang diberikan "Bebas tanpa Pengecualian" mencerminkan kinerja keuangan yang baik sehingga berdasarkan latar belakang di atas rumusan penelitian ini adalah: bagaimana keunggulan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Pemda DKI Jakarta dan Pemda Kota Surabaya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan membandingkan tingkat kemandirian dan kinerja pengelolaan keuangan daerah kedua daerah tersebut pada tahun 2014 sampai 2019

Tinjauan Pustaka

Desentralisasi atau boleh disebut otonomi daerah mengalami perkembangan luar biasa terutama setelah tahun 1999 (setelah masa orde baru) dengan diberlakukan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diganti dengan *UU No. 32 Tahun 2004*(Kusnandar and Siswanto 2018, 1) (Rinaldi 2012, 107). Menurut peraturan tersebut (Pasal 7) disebutkan "Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri (Akbar 2016, 32). Masih didominasi oleh pemerintah pusat (Susanti and Fahlevi 2015, 449) Sedangkan desentralisasi fiskal dapat dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat (Khusaini, 2006)". Pengertian di atas memberikan ruang wewenang yang lebih bagi pemerintah daerah (pemda) dalam hal pemanfaatan potensi daerah dan sumber daya serta kebijakan-kebijakan yang mendukung orientasi tersebut seperti peningkatan investasi yang produktif (*capital investment*) dan pelayanan publik, (Hidayat 2016;4) atau pemberian tingkat kewenangan tertentu (Susantao and Hery 2010, 78) sesuai dengan PP No. 18 tahun 2016 jo PP Nomor 72 tahun 2019. Penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada standar akuntansi pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelaporan sehingga laporan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitas dan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga, *good governance* dapat di capai (Albugis 2016,79).

Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan lebih diarahkan bagaimana mencapai

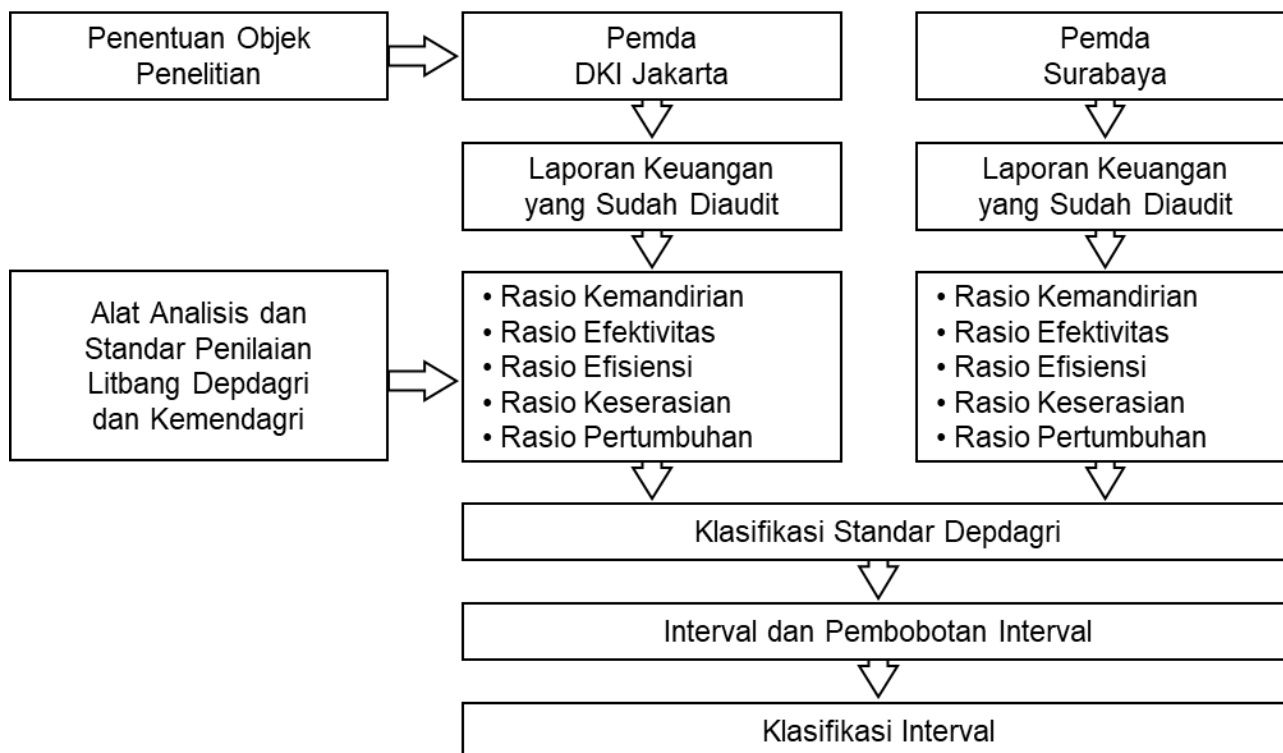
tujuan organisasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi (Laksono et al. 2020). Seiring dengan diterapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan No. 33 Tahun 2004 masing-masing tentang Otonomi Daerah dan “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”,(Kusnandar and Siswanto 2018, 3) (Kustianingsih, Muslimin, and Kahar 2018, 82) adanya pergeseran dan perubahan dalam pengelolaan daerah di Indonesia. Pergeseran dimaksud dalam penggunaan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah yang baik.(Urip Santoso 2008, 17) Oleh karenanya, diperlukan reformasi dengan dikeluarkan PP No. 58 tahun 2005. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai “hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Dari ketentuan tersebut pemda memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan administrasi keuangan yang berbasis akrual menghasilkan kualitas yang lebih baik (Dewi and Mimba 2014, 455) Penerapan ini diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel dibandingkan berbasis kas sebagaimana sebelumnya(Kurniati 2016;1269)

APBD disampaikan dalam bentuk laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dan upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. (Khafiyya, 2010., 4) APBD dapat digunakan sebagai sarana komunikasi pemerintah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Leonardus Julyano Sema 2021, 4). Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 ayat (1) menyatakan “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”(As Syifa 2014; 3). Pasal tersebut mengisyaratkan manajemen keuangan daerah harus dikelola secara profesional.

Laporan keuangan harus *relevan* dan dapat *diandalkan* terdiri dari: neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. (Mutihah 2016, 108) Dua syarat diatas menimbulkan kendala teknis dalam implementasi akuntansi sektor publik. Kendala tersebut adalah konsistensi dalam penyajian laporan keuangan, tingkat objektivitas dalam penyusunan, tepat waktu dalam penyajian, daya banding dengan periode sebelumnya dan dengan *daerah lain*, ekonomis dalam penyajian laporan, dan tingkat materialitas transaksi (Albugis 2016;79) dan dibuat sebagai media pertanggungjawaban serta disusun atas dasar asumsi kemandirian, entitas, adanya kesinambungan. (Urip Santoso 2008, 29) Objektivitas menjadi suatu kendala dalam penyajian laporan keuangan pemda yang relevan(Santoso 2008; 21). Laporan keuangan yang disusun dan disajikan pemda merupakan perwujudan dari Undang-undang nomor 17 tahun 2003. (Bakar 2022) (Rahmayanti 2016, 41)

Penelitian bermula dari penentuan objek penelitian yaitu Pemda DKI Jakarta dan Pemda Surabaya. Tema yang akan dibahas adalah kinerja keuangan kedua pemda sehingga laporan keuangan menjadi sangat dibutuhkan sebagai data primer. Dari data primer yang ada diolah dan di hitung besaran rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi, rasio keserasian serta rasio pertumbuhan. Hasil penghitungan rasio tersebut menentukan klasifikasi berdasarkan parameter yang dibuat Depdagri atau yang lainnya. Hasil

perhitungan rasio yang ada kemudian dianalisis dengan pendekatan skala interval sehingga diperoleh hasil pemda mana yang lebih baik. Dan bila disajikan dalam bentuk kerangka pemikiran penelitian, penilaian ini tampak sebagaimana di bawah ini:



Gambar 1: Tahapan Penelitian

Metode, Data dan Analisis

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang akan menggambarkan suatu fenomena didasarkan atas analisis laporan keuangan pemerintah. Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur untung mengetahui kemampuan daerah (Mutiha 2016, 108) dan merupakan proses peninjauan kritis mulai dari meninjau, menghitung hingga memberikan solusi keuangan perusahaan (Fazlurahman, Fatriananda, and Jauhari 2020, 58) serta pengukuran untuk menilai kinerja keuangan di masa lalu. (Fajar Nugroho 2012, 1). Tujuan pengukuran kinerja keuangan menilai kinerja keuangan dalam hal efisiensi dan efektivitas serta memonitor biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan (Marfiana and Kurniasih, n.d., 2) dan meningkatkan kinerja pemerintah. (Farida and Nugraha 2019, 108). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasio keuangan. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah menurut (Halim, 2002:128). Yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisien keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Rasio pertumbuhan merupakan salah satu dari tiga alat untuk mengukur kinerja keuangan (Hasibuan, Muhammad, and WahabSamad 2022, 3). Rasio ini menunjukkan kemampuan dalam membiayai sendiri kegiatan oleh pemerintah dalam memerintah dan membangun serta pemberian pelayanan kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam mendanai pembangunan melalui pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan (Hidayat 2016;7) Rasio kemandirian dapat dikatakan sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan meningkatkan rasio

kemandirian daerah yang tercermin dalam membayar pajak dan retribusi daerah (Rahmayanti 2016;5). Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemerintah pusat dan pinjaman (Susanto 2010, 77). Rasio ini dihitung sebagaimana di bawah ini:

$$RKKD = ((\text{pendapatan Asli daerah}) / (\text{Bantuan Pusat atau daerah})) \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, memberikan parameter penilaian kemandirian tersebut sebagaimana di bawah ini:

Tabel 1. Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: tim litbang Depdagri Fisipol UGM dikutip Zhufinsa Nur Rahmatina, 2011

Efektivitas mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. (J. Marsudi, A. Supradi, n.d., 36) Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi *riil* daerah. (Mutihah 2016, 109) Pengukuran rasio efektivitas bertujuan untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran sehingga memerlukan data-data realisasi dan target pendapatan. (Susantao and Hery 2010, 78) Semakin tinggi rasio efektivitas, mencerminkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio ini dihitung dengan membagi realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (Harahap 2020;36) sehingga dapat diturunkan menjadi:

$$REt = (\text{Realisasi PAD}) / (\text{Realisasi Penerimaan PAD}) \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Kriteria pengukuran aktivitas sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2. Kriteria pengukuran efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
> 90-100%	Efektif
> 80-90%	Cukup Efektif
> 60-80%	Kurang Efektif
≤ 60	Tidak Efektif

Sumber: Harahap 2020, 36

Rasio efisien adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. (Mutihah 2016, 109) Rasio efisiensi ini erat kaitannya dengan keluaran dalam bentuk barang atau dengan layanan yang dihasilkan dengan dari suatu sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan sebuah keluaran. (Fazlurahman, Fatriananda, and Jauhari 2020, 59) Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Rasio ini juga untuk mengetahui

besarnya tingkat efisiensi suatu kegiatan dengan membandingkan *input* yang digunakan dengan *output* yang dihasilkan. (Gede 2016;78) Pengukuran rasio ini adalah:

$$\text{REs} = ((\text{Pengeluaran Belanja}) / (\text{Pendapatan}) \times (100 \%)) \dots\dots\dots (3)$$

Tabel 3. Kriteria efisiensi keuangan daerah menurut pemerintah:

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100 % ke atas	Tidak Efisien
90 % - 100%	Kurang Efisien
80 % - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Rasio keserasian ini menunjukkan aktivitas Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan pengalokasian dana pada APBD secara optimal. Artinya ada sekala prioritas yang dilakukan pemda (Rahmayanti 2016;40). Pemerintahan yang sehat adalah yang mengalokasikan untuk investasi (belanja pembangunan) lebih besar daripada belanja rutin Formula penghitungan rasio keserasian adalah:

$$\text{RKs} = (\text{belanja Operasi} / \text{Belanja Daerah}) \times 100 \dots\dots\dots (4)$$

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai di periode sebelumnya. Rasio ini biasa digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dari tahun ke tahun (Nana 2014;2). Formula penghitungan Rasio Pertumbuhan (Fazlurahman, Fatriananda, and Jauhari 2020, 59) adalah:

$$\text{RpPAD} = (\text{R PAD Xn} - \text{R PAD Xn-1}) / \text{R PAD Xn-1} \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan:

Pp PAD = Rasio Pertumbuhan PAD

R PAD Xn = Realisasi PAD tahun berjalan

Rp ADXn-1 = Realisasi Penerimaan PAD tahun sebelumnya

Untuk menentukan keberhasilan secara riil digunakan pendekatan Interval level (Kholillah and Iramani 2013, 73) pencapaian yaitu suatu teknik statistik untuk menentukan bentangan kelas merupakan hasil bagi bentangan kelas dengan jumlah kelas yang di inginkan. Banyak kelas yang diinginkan 5 dengan pengertian level 1 sebagai rendah atau kecil sekali, 2 sebagai rendah atau kecil, 3 sedang dan 4 tinggi atau besar dan 5 adalah tingi sekali atau besar sekali atau tinggi sekali. Formula untuk menentukan besarnya interval statistik adalah. Analisis interval dan penentuan bobot ini digunakan untuk menentukan besarnya rasio keunggulan, efektivitas, efisien dan rasio pertumbuhan. Penentuan Formula interval dapat dilakukan sebagaimana di bawah ini (Dewi and Mimba 2014, 448)

$$\text{Si} = (\text{a-b})/5 \dots\dots\dots (6)$$

Keterangan:

Si= interval nilai

a = skor tertinggi

b = skor terendah

k = konstanta

Penelitian terdahulu yang membahas kemandirian keuangan, efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan, kemandirian, keserasian dan pertumbuhan keuangan sebagaimana di bawah ini:

No.	Peneliti	Jurnal dan Tahun	Tema	Variabel	Simpulan
1	Paramitha Sandy Mokodompit Sifrid S. Pangemanan Inggriani Elim	Jurnal EMBA 1521 Vol.2 No.2 Juni 2014, Hal. 1521-1527	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu	Sentralisasi Ketergantungan keuangan Kemandirian PAD	Rasio derajat desentralisasi kinerja keuangannya, masih kurang. Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi. Rasio kemandiriannya masih sangat rendah. Saran untuk pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana lebih meningkatkan PAD.
2	Arthaingan H.Mutiha	Jurnal Vokasi Indonesia Volume 4 Nomor 2, tahun 2016 pp 105-121	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 - 2014	Tingkat kemandirian Efektivitas Anggaran	Rasio tingkat kemandirian keuangan kota Bogor memiliki hubungan yang konsultatif. Pemerintah kota Bogor sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya, serta memiliki rasio pertumbuhan yang positif. Namun pemerintah kota Bogor masih memprioritaskan anggaran dalam belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung
3	Faesal Fazlurahman Chandra Fatriananda Rifqie Jauhari	JURNAL ILMIAH EKONOMI GLOBAL MASA KINI VOLUME 11 No. 01 Juli 2020 ISSN PRINT : 2089-601	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Sebelum dan Setelah Mendapatkan Opini WTP dari BPK)	Kemandirian Efektivitas pendapatan Pertumbuhan Opini audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio independen keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan daerah, dan pertumbuhan pendapatan daerah. Kinerja keuangan Kota Bandung sebelum dan sesudah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian telah menunjukkan perbaikan yang berarti,
4	J. Marsudi, A. Supradi, F.Susandra	JURNAL AKUNIDA ISSN 2442-3033 Volume 5 Nomor 2, Desember 2019	Tingkat Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas, Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah: Kajian Pada Provinsi Jawa Barat	Kemandirian keuangan Efisiensi Efektivitas Pertumbuhan pendapatan asli daerah	secara simultan Kemandirian, Efisiensi dan Efektivitas berpengaruh terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, secara parsial variabel Kemandirian tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan variabel Efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan variabel Efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli. Derah

Hasil dan Pembahasan

Kemandirian keuangan tidak mungkin berubah tanpa peran masyarakat (Kustianingsih, Muslimin, and Kahar 2018, 88) dan rasio ini berguna untuk mengetahui kekuatan Pendapatan Asli Daerah di bandingkan bantuan pemerintah (dana transfer dari pusat atau provinsi). Tabel 4 (lampiran) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Bantuan Pemerintah (DAK, DAU & DBH) DKI Jakarta dapat di simpulkan (1) Tahun 2014 tingkat kemandirian Anggaran DKI Jakarta tinggi sekali karena berada 257,18% atau dikategorikan baik sekali dan angka kemandirian pada tahun berikutnya meningkat drastis menjadi 389,78% (tahun 2015) (2) Tahun 2016 Angka kemandirian mengalami penurunan yang cukup menjadi 241.55% disebabkan kenaikan bantuan pusat naik hampir dua kali lipat sementara Pendapatan Asli daerah mengalami kenaikan yang tidak sampai 15% (4) Tahun 2017 PAD mengalami kenaikan hampir Rp 7 triliun tetapi

kenaikan dana transfer hanya sebesar 3,6 triliun rupiah sehingga kemandirian keuangan masih mengalami penurunan. (5) mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 rasio kemandirian terus mengalami kenaikan dari 231,4% hingga menjadi 268,9%. Tetapi secara umum kemampuan keuangan enam tahun berturut-turut sangat tinggi karena rasio kemandirian keuangan diatas 50% Jumlah ini merupakan angka tertinggi sepanjang lima tahun.

Rasio kemandirian Kota Surabaya secara umum masih dibawah rasio kemandirian DKI Jakarta walaupun masih dalam kategori Sangat Tinggi karena dalam waktu enam tahun tidak pernah sekalipun kemampuan keuangan mencapai 300%. Tabel 5 memperlihatkan (1) pada tahun 2014 rasio kemandirian yang dicapai hanya 121,5% dan ini merupakan pencapaian kemandirian keuangan terendah sepanjang 6 tahun berturut-turut. (2) Tahun 2015 rasio kemandirian keuangan mengalami kenaikan 25% menjadi 157,7%. Kenaikan tersebut disebabkan Kenaikan PAD lebih dari 700 milyar rupiah semenara kenaikan bantuan dari pusat hanya minus 70 milyar rupiah. (3) Tahun 2016 Kenaikan yang dicapai pada tahun 2015 tidak dapat dipertahankan, terjadi penurunan sebesar 8% hingga menjadi 149,79%. (4) sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 kemandirian keuangan Kota Surabaya terus mengalami kenaikan pada posisi 268,9%.

Secara umum sepanjang enam tahun DKI Jakarta memiliki kemandirian keuangan yang lebih baik. Tabel 7 (lampiran) memperlihatkan pada tahun 2014 DKI Jakarta memiliki level 4 sementara Kota Surabaya hanya berada di level 1. Begitu juga pada tahun berikutnya ketika Jakarta berada di Level 6 Surabaya berada di Level 2. Dalam enam tahun berturut-turut total level pencapaian DKI Jakarta sebesar 22 sementara Kota Surabaya hanya 13. Secara Rasio DKI Jakarta memiliki pencapaian 60% sementara Kota Surabaya sebesar 40% (Tabel 4)

Penelitian kemandirian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faesal untuk Pemda Bandung karena masih dalam kategori rendah (Fazlurahman, Fatriananda, and Jauhari 2020, 60), juga tidak sejalan dengan untuk Pemda Subang tahun 2014-2017 karena masih dalam kategori rendah sekali dan rendah (Farida and Nugraha 2019, 114)

Berdasarkan dari Tabel 1 (lampiran) diatas untuk Rasio Efektivitas dan Kriteria Efektivitas Kota Jakarta dalam 5 tahun adalah: (4) Tahun 2014 dengan jumlah Anggaran Rp.65.042.009 Juta dan Realisasi Rp.43.824.300 Juta, Rasio Efektivitas Kota Jakarta sebesar 67,38%. Dengan Kriteria Rasio Efektivitas yang Kurang Efektif karena <80%. (2) Tahun 2015 Rasio Efektivitas Kota Jakarta mengalami peningkatan sebesar 11,13%. Dengan jumlah Anggaran Rp.56.309.238 Juta dan Realisasi Rp.44.209.238 Juta hasil Rasio Efektivitasnya adalah 78,51%. Namun masih dengan (3) Kriteria Rasio Efektivitas yang Kurang Efektif karena masih <80%. (4) Tahun 2016 Rasio Efektivitas Kota Jakarta juga mengalami kenaikan dengan Anggaran Rp.57.161.248 Juta dan Realisasi Rp.53.784.706 Juta menjadi 94,09%. Kriteria Rasio Efektivitas Kota Jakarta juga mengalami peningkatan menjadi Efektif karena >90% (5) Tahun 2017 Kota Jakarta terus meningkatkan Rasio Efektivitasnya, dengan Anggaran Rp.62.517.744 Juta dan Realisasi Rp. 64.823.887 Juta menjadi 103,69%. Kriteria Rasio Efektivitas Kota Jakarta pun berada ditingkat paling atas yaitu Sangat Efektif karena >100% (6) Setelah 4 tahun mengalami peningkatan, di tahun 2018 Rasio Efektivitas Kota Jakarta mengalami penurunan sebesar 10,64%. Dengan Anggaran Rp.65.809.931 Juta dan Realisasi Rp.61.235.824 Juta, Rasio Efektivitas Kota Jakarta menjadi 93,05%. Kriteria Rasio Efektivitas Kota Jakarta pun kembali menjadi Efektif karena <100% (7) Jumlah dari

Anggaran dan Realisasi selama 5 tahun yaitu Rp.306.840.260 Juta dan Rp.267.877.955 Juta, maka jumlah Rasio Efektivitas Kota Jakarta selama 5 tahun adalah 87,30%. Berada di Rasio Efektivitas <90% membuat Kriteria Efektivitas Kota Jakarta selama 5 tahun menjadi hanya Cukup Efektif.

Berdasarkan dari Tabel 5 (lampiran) diatas Rasio Efektivitas Kota Surabaya dalam 5 tahun menunjukkan (1) Tahun 2014 Kota Sura-baya memiliki Anggaran Rp.6.150.194 dan Realisasi Rp.6.052.441 menjadikan Rasio Efektivitas Kota Surabaya sebesar 98,41%. Dan Kriteria Rasio Keuangannya adalah Efektif karena Rasio Efektivitas yang dimiliki >90%. (2) Tahun 2015 dengan Anggaran Rp.6.642.257 dan Realisasi Rp.6.619.031 Rasio Efektivitas Kota Surabaya sebesar 99,65%, masih dalam Kriteria Rasio Efektivitas Efektif karena <100%. (3) Tahun 2016 Kota Surabaya masih meningkatkan Rasio Efektivitasnya di 101,57% dengan besar Anggaran Rp.6.720.301 dan Realisasi Rp.6.825.754. Juga meningkatkan Kriteria Rasio Efektivitas menjadi Sangat Efektif. (4) Tahun 2017 tidak berbeda dari tahun sebelumnya, Rasio Efektivitas Kota Surabaya masih meningkat menjadi 101,63% dengan besar Anggaran Rp.7.940.894 dan Realisasi Rp.8.033.573. Tetap berada pada Kriteria Rasio Efektivitas Sangat Efektif. (5) Tahun 2018 Rasio Efektivitas Kota Surabaya mengalami sedikit penurunan menjadi 101,19%, dengan Anggaran Rp.8.079.142 dan Realisasi Rp.8.175.219, namun tetap berada pada Kriteria Rasio Efektivitas Sangat Efektif. Jumlah selama 5 tahun Anggaran dan Realisasi Kota Surabaya adalah Rp. 35.496.788 dan Rp.35.706.018, dan Jumlah Rasio Efektivitas Kota Surabaya selama 5 tahun sebesar 100,59%.

Hasil rasio efektivitas sejalan dengan penelitian lain untuk pemda Bogor pada tahun 2014 dalam kategori efektif sebagaimana rasio efektivitas Pemda Surabaya. (Mutihah 2016, 115) Juga sejalan dengan hasil Pemda Surabaya sebagaimana dilakukan oleh Agustina untuk pemda Semarang. (Agustina 2013, 5) Dan sejalan rasio efektivitas Pemda DKI tahun 2017 serta Pemda Surabaya tahun 2017 dan 2018 yang dilakukan oleh Aditya dan kawan-kawan untuk pemda yang sama (Perdana et al. 2020, 342)

Rasio efisien adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen.

Berdasarkan dari Tabel 4 (lampiran) diatas maka untuk Rasio Efisiensi Kota Jakarta dalam 5 tahun (1) Tahun 2014 dengan Realisasi Belanja Daerah Rp.37.799.664 Juta dan Realisasi Pendapatan.

Belanja Operasi Kota Jakarta dalam 5 tahun (1) Dari tahun 2014 sampai 2016 Kota Jakarta mengalami peningkatan Rasio Belanja Operasi yaitu 72,45% (tahun 2014), 75,98% (tahun 2015), dan 80,89% (tahun 2016) dari total Belanja Daerah. Peningkatan tersebut dikarenakan naiknya tingkat Belanja Daerah yang dipengaruhi oleh Pendapatan Daerah, dan terjadi peningkatan Belanja Operasi yang cukup seimbang. (2) Kemudian pada tahun 2016 sampai 2018 Rasio Belanja Operasi Kota Jakarta mengalami penurunan persentase yaitu 78,19% (tahun 2017) dan 76,88% (tahun 2018) dari total Belanja Daerah, dikarenakan kenaikan tingkat belanja daerah yang besar tetapi tingkat Belanja Operasi hanya mengalami sedikit kenaikan. (3) Total persentase Rasio Belanja Operasi Kota

Jakarta selama 5 tahun dengan total Belanja Operasi Rp.184.357.480 Juta dan total Belanja Daerah Rp.239.164.138 Juta adalah 77,08%.

Untuk kota Surabaya dari Tabel 5 (lampiran) diatas maka untuk Rasio Belanja Operasi Kota Surabaya dalam 5 tahun (1) Pada tahun 2014-2015 Rasio Belanja Operasi Kota Surabaya mengalami penurunan dari 75,39% ke 72,50%, disebabkan oleh kenaikan jumlah Belanja Daerah tidak diimbangi oleh jumlah kenaikan Belanja Operasi. (2) Tahun 2016 tingkat Rasio Belanja Operasi Kota Surabaya meningkat menjadi 74,98% dan ditahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 68,18%. Peningkatan disebabkan oleh kenaikan jumlah Belanja Operasi yang menyeimbangi jumlah Belanja Daerah, dan penurunan yang terjadi disebabkan oleh jumlah Belanja Operasi yang tidak menyeimbangi jumlah Belanja Daerah. (3) Tahun 2018 Kota Surabaya kembali ada peningkatan Rasio Belanja Operasi yaitu 70,09% dikarenakan jumlah Belanja Operasi mengalami kenaikan yang lebih besar dari jumlah Belanja Daerah. (4) Total persentase Rasio Belanja Operasi Kota Surabaya selama 5 tahun dengan total Belanja Operasi Rp. 25.496.557 Juta dan total Belanja Daerah Rp.35.438.736 Juta adalah 71,95%.

Tabel 6 dan 7 (lampiran) memperlihatkan Pemda Surabaya lebih serasi dalam penggunaan keuangan daerah dari pada DKI Jakarta. Tabel 4 memperlihatkan Pemda Surabaya memiliki level pencapaian sebesar hampir dua kali lipat dari pada Pemda DKI Jakarta. Penyebab Pemda Surabaya memiliki pencapaian yang lebih besar di perlihatkan di tabel 3 (lampiran). Pemda Surabaya memiliki level pencapaian tertinggi (level penuh) sebanyak tiga kali di tahun 2017, 2018 dan 2019 sementara DKI tidak pernah sekalipun memiliki level pencapaian tertinggi. Level tertinggi yang diperoleh DKI Jakarta dalam enam tahun berturut-turut hanya sekali saja, itu pun hanya berada pada level 4 yang terjadi ditahun 2014

Hasil penelitian untuk Pemda Surabaya dan DKI Jakarta menunjukan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farida dan kawan-kawan karena keserasian APBD Pemda subang berada diatas 60%-81% untuk tahun 2014-2017. (Farida and Nugraha 2019, 116) Juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anim untuk Pemda Sukoharjo dimana rasio keserasian operasional bergerak antara 89,6% - 83,4% untuk tahun 2011-2013. (Rahmayanti 2016, 50)

Rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

Berdasarkan dari Tabel 4 (lampiran) diatas maka untuk Rasio Pertumbuhan Kota Jakarta dalam 5 tahun adalah: (1) Tahun 2014 Rasio Pertumbuhan Kota Jakarta sebesar 16,47%, menandakan bahwa pertumbuhan keuangan daerah Kota Jakarta pada tahun 2014 meningkat dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat dari penerimaan PAD tahun ini dan tahun sebelumnya (2) Tahun 2015 Rasio Pertumbuhan Kota Jakarta sebesar 7,71% menandakan bahwa pertumbuhan keuangan daerah Kota Jakarta meningkat dari tahun sebelumnya, namun tingkat persentase Rasio Pertumbuhan menurun sebesar 8,76% dari 16,47% (tahun 2014). (3) Tahun 2016 Rasio Pertumbuhan Kota Jakarta sebesar 9,50% menandakan bahwa pertumbuhan keuangan daerah Kota Jakarta meningkat dan tingkat persentase Rasio Pertumbuhan tahun 2016 juga meningkat sebesar 1,79% dari tahun sebelumnya. (4) Tahun 2017 angka Rasio Pertumbuhan Kota Jakarta mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan menjadi tahun yang mengalami pencapaian tingkat Rasio Pertumbuhan yang

paling besar selama 5 tahun yaitu 19,01% dari 9,50% (tahun 2016). (5) Setelah mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2017, di tahun 2018 keuangan daerah dan Rasio Pertumbuhan Kota Jakarta justru sama sekali tidak meningkat dengan mengalami penurunan menjadi -1,31%.

Akumulasi Rasio Pertumbuhan Kota Jakarta selama 5 tahun adalah 9,55%. Menandakan bahwa keuangan daerah Kota Jakarta dan tingkat Rasio Pertumbuhan dari tahun 2014 sampai 2018 meningkat. Pertumbuhan kinerja keuangan untuk kota Surabaya (tabel 5) memperlihatkan Rasio Pertumbuhan Kota Surabaya dalam 5 tahun adalah (1) Tahun 2014 Rasio Pertumbuhan Kota Surabaya terjadi peningkatan sebesar 18,47%, menandakan bahwa keuangan daerah Kota Surabaya meningkat dari tahun sebelumnya, bisa dilihat dari penerimaan PAD tahun ini dan tahun sebelumnya (2) Tahun 2015 kembali terjadi peningkatan Rasio Pertumbuhan pada Kota Surabaya sebesar 22,05% lebih besar 3,55% dari tahun sebelumnya jika dilihat dari persentase. Menandakan bahwa keuangan daerah Kota Surabaya juga kembali mengalami peningkatan, bisa dilihat dari penerimaan PAD tahun ini dan tahun 2014. (3) Tahun 2016 Kota Surabaya hanya mengalami peningkatan Rasio Pertumbuhan 1,35%, jika dilihat dari persentase peningkatannya lebih kecil dari tahun lalu yaitu 22,02% (tahun 2015) (4) Tahun 2017 Rasio Pertumbuhan Kota Surabaya sebesar 26,20% meningkat lebih besar 24,85% dari tahun lalu, menjadi tingkat pertumbuhan paling besar selama 5 tahun, (5) Tahun 2018 Kota Surabaya mengalami penurunan tingkat pertumbuhan sebesar -3,66%, disebabkan oleh penurunan PAD yang diperoleh dibanding tahun sebelumnya. Dan (6) Akumulasi Rasio Pertumbuhan Kota Surabaya selama 5 tahun adalah 11,25%. Menandakan bahwa keuangan daerah Kota Surabaya dan tingkat Rasio Pertumbuhan dari tahun 2014 sampai 2018 meningkat.

Penelitian diatas sejalan dengan kesimpulan dari hasil penelitian Faesal untuk pertumbuhan Pemda Bandung pada tahun 2013-2018 yang bergerak antara 8,3% hingga 31,7% (Fazlurahman, Fatriananda, and Jauhari 2020, 61) tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (Agustina 2013, 8) yang bergerak tumbuh mulai 39,8% pada tahun 2007 hingga 63,7% pada tahun 2011 walaupun terjadi pertumbuhan minus pada tahun 2008 sebesar 4,2% untuk Pemda Bandung.

Dari lima uji keuangan kedua pemerintah daerah tidak memperlihatkan adanya keunggulan mutlak untuk satu pemerintahan ataupun sebaliknya. Jakarta unggul dalam hal kemandirian keuangan dibandingkan dengan Pemda Surabaya. Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) DKI Jakarta memiliki kemandirian keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan Pemda Surabaya dengan perolehan total skor lebih dari dua kali lipat dari pada Pemda Surabaya. Hasil analisis memperlihatkan sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 kemandirian keuangan DKI Jakarta bergerak mulai dari 257,1% pada tahun 2014 hingga 315,35% pada tahun 2019. Sementara Surabaya pencapaian kemandirian keuangan bergerak mulai dari 121,53% pada tahun 2014 hingga 268,92% pada tahun 2019. Atas dasar pencapaian tersebut wajar apabila total level pencapaian DKI lebih tinggi dari pada Pemda Surabaya. (2) Apabila dilihat dari sisi efektivitas ternyata DKI Jakarta tidak jauh lebih efektif dalam mengelola anggaran Skor pembobotan DKI Jakarta memperlihatkan hanya sebesar 19 sementara Kota Surabaya sebesar 29. Keunggulan efektivitas Pemda Surabaya terjadi mulai tahun 2015 hingga tahun 2019 sementara Pemda DKI Jakarta hanya sekali berada pada posisi tertinggi. Total pengukuran Efektivitas untuk DKI Jakarta hanya

19 sementara Pemda Surabaya memiliki skor sebesar 29. (3) Dari sisi efisiensi DKI Jakarta memperlihatkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dari pada Surabaya masing-masing berbanding 17 dan 9 hampir dua kali lipat. Keunggulan DKI Jakarta terjadi pada tahun 2014, 2016 dan 2017 (4) Dalam hal keserasian penggunaan anggaran terlihat bahwa DKI Jakarta memiliki keserasian keuangan jauh dibawah Pemda Surabaya. Pakta ini memperlihatkan bahwa Belanja modal dan belanja daerah pemda Surabaya lebih baik Jakarta hanya lebih unggul pada tahun 2014 dan Pemda Surabaya memiliki keunggulan mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019. (tabel 5). Dalam hal pertumbuhan keuangan secara rata-rata terlihat Pemda Jakarta sedikit berada dibawah Pemda Surabaya. Jika Pemda Surabaya dapat tumbuh sebesar 9,29% sementara DKI hanya tumbuh sebesar 8,9% (7) Secara umum DKI Jakarta memiliki label kinerja keuangan sebanyak 83 sementara Pemda Surabaya memiliki jumlah total sebanyak 90. Dan apabila dirata-ratakan Surabaya memiliki level 18 dan Jakarta hanya 16,6. Level tersebut apa Jakarta sebesar 47,98%

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Jakarta dan Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang diukur melalui Rasio Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: (1) Tingkat kemandirian keuangan Pemda DKI dalam lima tahun berturut turut lebih baik dari pada Pemda Surabaya di mana kenaikan Pendapatan Asli daerah selalu lebih tinggi dari pada kenaikan setoran dari pusat (2) Tingkat efektivitas penggunaan keuangan Pemda Surabaya lebih baik dari pada tingkat efektivitas Penggunaan Keuangan pemda DKI Jakarta disebabkan Pemda DKI hanya sekali meraih level tertinggi setara Pemda Surabaya memiliki level tertinggi seba-nyak lima kali (3) Walaupun tidak cukup efektif dalam penggunaan keuangan, DKI Jakarta lebih efisien dalam menggunakan anggaran dari pada Pemda Surabaya. (4) dalam hal keserasian dan pertumbuhan ekonomi, Pemda Surabaya berada di level yang lebih baik dari pada DKI Jakarta. Pertumbuhan rata-rata pemda Surabaya sebesar 9,29% dalam kurun waktu enam tahun berturut-turut sementara DKI Jakarta hanya 8,9%

Walaupun secara agregat pemda DKI memiliki skor sedikit lebih rendah dari pemda Surabaya tetapi secara parsial keuangan pemda DKI lebih mandiri dan lebih efisiensi. Hal ini memperlihatkan program penggunaan anggaran DKI Jakarta masih kurang efektif dibanding pemda Surabaya. Efektif mencerminkan pencapaian dan kurang sempurna yang mencerminkan perencanaan yang masih rendah oleh karenanya aspek perencanaan ditingkatkan hal ini juga terlihat dari aspek keserasian yang juga rendah.

Referensi

- Agustina, Oesi. 2013. "Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011) Disusun Oleh :." *Fakultas Ekonomi Universitas Brawijayaa*.
- Akbar, Surya. 2016. "Analisa Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Indragiri Hulu." *Jiaganis* 1 (1): 31–48.
- Albugis, febriana F. 2016. "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal EMBA* 4 (3): 78–89.

- As Syifa Nurilah, dul Muid. 2014. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akunatnsi Keuangan , Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Journal Of Accounting* 3 (2): 2337–3806.
- Bakar, Abu. 2022. "Pemodelan Pengukuran Kinerja Pemda Dalam Menaikkan Pendapatan Pajak Dalam Perspektif Pendapatan Asli Daerah Kota Wisata Dan Kota Bisnis" 28 (1): 52–71.
- Dewi, P Ayu Ratna, and Ni Putu Sri Harta Mimba. 2014. "Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8 (3): 442–57. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8252>.
- Fajar Nugroho, Abdul Rohman. 2012. "Pengaruh Kinerja Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebaai Variabel Intervening(Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah)." *Jurnal Accounting Of Diponoro* 1 (1): 1–14.
- Farida, Ai Siti, and Raden Faisal Maulana Nugraha. 2019. "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11 (2): 107–24. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i2.7644>.
- Fazlurahman, Faesal, Chandra Fatriananda, and Rifqie Jauhari. 2020. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Sebelum Dan Setelah Mendapatkan Opini WTP Dari BPK." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 11 (1): 56. <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v11i1.1062>.
- Gede, I Dewa. 2016. "Kinerja Kenuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2007." *Ganeç Swara* 4 (3): 70–85.
- Harahap, Heri Faisal. 2020. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah." *Journal Of Economi and Busines* 4 (1): 34–38. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>.
- Hasibuan, Ahmad Nurdin, Muhammad, and Abdul WahabSamad. 2022. "Analisa Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan PT Karya Indo Selera Periode Tahun 2016-2020." *Jurnal Binis Dan Manajemen* 2 (1): 30–53.
- Hasiibuan, Ahmad Nurdin, and Aris Fatoni. 2022. "Analisa Kinerja Keuangan Yang Dpengaruhi Tata Kelola Perusahaan Dan Rasio Ekuitas Perusahaan Manufaktur Sektor Consumers Goods Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2019." *Jabisi* 3 (1).
- Hidayat, Muhamad fajar. 2016. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belnja Modal (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijayaa.
- J. Marsudi, A. Supradi, F.Susandra. n.d. "Tingkat Kemandirian, Efisiensi, Efektifitas Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kajian Pada Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Akunida* 5 (2): 32–48.
- Kartoprawiro, Sardio, and Yohanes Susanto. 2018. "Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya* 16 (1): 1–14. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6242>.
- Khafiyya, Nida An. n.d. "Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur."
- Kholilah, Naila Al, and Rr. Iramani. 2013. "STUDI FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR PADA MASYARAKAT SURABAYA STIE Perbanas Surab." *Journal of Business and*

Banking Volume 3, (1): 1, pages 69 – 80 69.

- Kurniati, Ida Ayu Emmy. 2016. "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16 (1): 1290–1318.
- Kusnandar, and Dodi Siswanto. 2018. "Pengaruh Dana Alokasi." *Beta Asteria*, 13–30.
- Kustianingsih, Nurafni, Muslimin, and Abdul Kahar. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah." *Katalogis* 6 (6): 82–91.
- Laksono, Rudi, Ahmad Nurdin Hasibuan, Dadan Sundara, Nova Permatasari, and Renny Saidih. 2020. "Pendampingan Pelatihan Kewirasusahaan Mahasiswa IBI Kosgoro 1957." *Teratai* 2 (1).
- Leonardus Julyano Sema, Akhmad Riduawan. 2021. "Analisis Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal." *Jurnal Ilmu Dan Riset* ...<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3985%0Ahttp://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3985/3996>.
- Marfiana, Nandhya, and Lulus Kurniasih. n.d. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota."
- Mole, Dance. 2015. "Penerapan Akuntansi Ekuitas Pada Pemda Bitung." *Jurnal EMBA* 3 (3): 1059–1057.
- Mutiha, Arthaingan. 2016. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014." *Jurnal Vokasi Indonesia* 4 (2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v4i2.101>.
- Nana, ni luh. 2014. "Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota." *E Journal Akuntansi Universitas Udayana* 3: 481–97.
- Perdana, Tito Aditya, Risanda A Budiantoro, Febrianur Ibnu, and Fitroh Sukono. 2020. "Mengukur Kinerja Apbd Kota Surabaya Analisis Value for Money Measuring the Performance of APBD in the City of Surabaya , Analysis of Value for Money" 16 (2): 339–46.
- Profitabilitas, D A N, Studi Empiris, Pada Perusahaan, Medy Desma Fatwara, Ahmad Nurdin Hasibuan, and L M Nursalam. 2022. "Analisa Faktor Corporate Social Responsibility Dipengaruhi Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan Dan Profitabilitas Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indek LQ 45" 2 (1): 54–70.
- Rahmayanti, Anim. 2016. "Ananlisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013." *EKA CIDA* 1 (1): 5.
- Rinaldi, Udin. 2012. "Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah." *EKSOS* 8 (2): 105–13.
- Setia, Azhar Karya. 2008. "Analisis Kinerja Keuangan PPemerintah Daerah/Kota Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah." *Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*.
- Susantao, Susaunto, and I Dewa Gde Bisma Hery. 2010. "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun Anggaran 2003 – 2007." *Ganeç Swara* Vol. 4 (3): 75–86.

Susanti, Susi, and Heru Fahlevi. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1 (1): 189–91.

Urip Santoso, Yohanes Joni Pabelum. 2008. "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." *Jurnal Administrasi Dan Bisnis* 4 (1): 216–1249.

Internet

[Kompas.com](https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/31/14011451/4-kali-berturut-turut-pemprov-dki-jakarta-kembali-raih-wtp-dari-bpk), artikel "4 Kali Berturut-turut, Pemprov DKI Jakarta Kembali Raih WTP dari BPK";: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/31/14011451/4-kali-berturut-turut-pemprov-dki-jakarta-kembali-raih-wtp-dari-bpk>.

¹<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/sembilan-kali-berturut-turut-opini-wtp-erica-hyadi-ini-bentuk-lpj-kami-kepada-masyarakat>

Lampiran

Tabel 4. Kinerja keuangan pemda DKI Jakarta tahun 2014-2019

Keterangan	Kemandirian					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PAD DKI Jakarta	31.274.215	33.686.176	36.888.017	43.901.488	4.973.031	5.381.920
Total Bantuan Pusat	12.160.469	8.642.378	15.271.661	18.969.291	2.088.870	2.001.328
Rasio Kemandirian	257,18%	389,78%	241,55%	231,43%	238,07%	268,92%
Kemampuan Keuangan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Efektifitas					
Anggaran PAD	65.042.099	56.309.238	57.161.248	62.517.744	65.809.931	74.997.497
Realisasi PAD	0	44.209.238	53.784.706	64.823.887	61.235.824	62.300.680
Rasio Efektivitas	67,38%	78,51%	94,09%	103,69%	93,05%	83%
Kriteria Efektivitas	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Kurang Efektif
	Efisiensi					
Realisasi Belanja Daerah	37.799.664	42.660.170	46.918.496	50.721.960	61.063.848	64.099.287
Realisasi Pendapatan Daerah	43.824.300	44.209.238	53.784.706	64.823.887	61.235.824	62.300.680
Rasio Efisiensi	86,25%	96,50%	87,23%	78,25%	99,72%	102,89%
	Efisien	Efisien	Efisien	Efisien	Efisien	
	Serasi					
Belanja Modal	10.411.118	10.244.016	8.965.470	11.045.723	14.118.608	11.551.928
Belanja Daerah	37.799.664	42.660.170	46.918.496	50.721.960	61.063.848	64.099.287
Rasio Belanja Modal	27,54%	24,01%	19,11%	21,78%	23,12%	18,02%
	Pertumbuhan					
Realisasi Penerimaan PAD t	31.274.215	33.686.176	36.888.017	43.901.488	43.327.137	45.707.400
Realisasi Penerimaan PAD t-1	26.852.192	31.274.215	33.686.176	36.888.017	45.707.400	43.327.137
Rasio Pertumbuhan	16,47%	7,71%	9,50%	19,01%	-1,31%	5,21%

Catatan: Data di olah berdasarkan laporan keuangan Pemda DKI Jakarta yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi

Tabel 5. Kinerja keuangan pemda Surabaya tahun 2014-2019

Keterangan	Kemandirian Keuangan					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PAD Surabaya	3.307.323	4.035.649	4.090.206	5.161.844	4.973.031	5.381.920
Bantuan Pusat	2.721.487	2.558.578	2.730.547	2.821.706	2.088.870	2.001.328
Rasio Kemandirian	121,53%	157,73%	149,79%	182,93%	238,07%	268,92%

Kemampuan Keuangan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Efektivitas						
Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anggaran PAD	6.150.194	6.642.257	6.720.301	7.904.894	8.079.142	5.234.687
Realisasi PAD	6.052.441	6.619.031	6.825.754	8.033.573	8.175.219	5.381.920
Rasio Efektivitas	98,41%	99,65%	101,57%	101,63%	101,19%	102,81%
Kriteria Rasio Efektivitas	Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	sangat efektif
Efisiensi						
Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi Belanja Daerah	5.707.378	6.490.359	7.151.661	7.912.409	8.176.929	9.162.656
Realisasi Pendapatan Daerah	6.052.441	6.619.031	6.825.754	8.033.573	8.175.219	8.765.153
Rasio Efisiensi	94,30%	98,06%	104,77%	98,49%	100,02%	104,54%
	Efisien	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien	
Keserasian						
Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Belanja Modal	1.404.366	1.785.125	1.789.394	2.517.891	2.430.061	2.754.305
Belanja Daerah	5.707.378	6.490.359	7.151.661	7.912.409	8.176.929	9.162.656
Rasio Belanja Modal	24,61%	27,50%	25,02%	31,82%	29,72%	30,06%
Pertumbuhan						
Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Realisasi Penerimaan PAD t	3.307.323	4.035.649	4.090.206	5.161.844	4.973.031	5.381.920
Realisasi Penerimaan PAD t-1	2.791.580	3.307.323	4.035.649	4.090.206	5.161.844	4.973.031
Rasio Pertumbuhan	18,47%	22,02%	1,35%	26,20%	-3,66%	7,60%

Catatan: Data di olah berdasarkan laporan keuangan Pemda Surabaya yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi

Tabel 6. Perbandingan kinerja keuangan pemda DKI Jakarta dan Surabaya tahun 2014-2019

Alat Analisis	Tahun	JAKARTA			SURABAYA		
	Tahun	Rasio Keuangan Jakarta	Kriteria Pencapaian	Level	Rasio Keuangan Surabaya	Kriteria Pencapaian	Level
Mandiri	2014	257,18%	sangat tinggi	4	121,53%	sangat tinggi	1
	2015	389,78%	sangat tinggi	5	157,73%	sangat tinggi	2
	2016	241,55%	sangat tinggi	3	149,79%	sangat tinggi	1
	2017	231,43%	sangat tinggi	3	182,93%	sangat tinggi	2
	2018	242,66%	sangat tinggi	3	238,07%	sangat tinggi	4
	2019	315,35%	sangat tinggi	4	268,92%	sangat tinggi	3
	Jumlah			22			13
Efektivitas	2014	67,38%	Kurang Efektif	1	98,41%	Efektif	4
	2015	78,51%	Kurang Efektif	2	99,65%	Efektif	5
	2016	94,09%	Efektif	4	101,57%	Sangat Efektif	5
	2017	103,69%	Sangat Efektif	5	101,63%	Sangat Efektif	5
	2018	93,05%	Efektif	4	101,19%	Sangat Efektif	5
	2019	83,07%	Kurang Efektif	3	102,81%	sangat efektif	5
	Jumlah			19			29
Efisiensi	2014	86,25%	Cukup Efisien	4	94,30%	Kurang Efisien	2
	2015	96,50%	Kurang Efisien	2	98,06%	Kurang Efisien	2

Efisien	2016	87,23%	Cukup Efisien	4	104,77%	Tidak Efisien	1
	2017	78,25%	Efisien	5	98,49%	Kurang Efisien	2
	2018	99,72%	Kurang Efisien	1	100,02%	Tidak Efisien	1
	2019	102,89%	Tidak Efisien	1	104,54%	Tidak Efisien	1
	Jumlah			17			9
Serasi	2014	27,54%		4	24,61%		3
	2015	24,01%		3	27,50%		4
	2016	19,11%		1	25,02%		3
	2017	21,78%		2	31,82%		5
	2018	23,12%		2	29,72%		5
	2019	18,02%		1	30,06%		5
	Jumlah			13			25
Pertumbuhan	2014	16,47%		4	18,47%		4
	2015	7,71%		2	22,02%		5
	2016	9,50%		3	1,35%		1
	2017	19,01%		4	26,20%		5
	2018	-1,31%		1	-3,66%		1
	2019	5,21%		2	5,21%		2
	Jumlah			12			14

Catatan: Data di olah berdasarkan laporan keuangan Pemda DKI Jakarta dan Pemda Surabaya Yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi

Tabel 7. Resume analisis perbandingan kinerja pemda DKI Jakarta dan pemda Surabaya tahun 2014-2019

Resume	Jumlah Level		Jumlah	Rasio Keunggulan	
	DKI Jakarta	Pemda Surabaya		DKI Jakarta	Pemda Surabaya
Kemandirian	22	13	30	60,00%	40,00%
Efektivitas	19	29	43	41,86%	58,14%
Efisiensi	17	9	20	65,00%	35,00%
Serasi	9	25	31	29,03%	70,97%
Pertumbuhan	12	14	26	46,15%	53,85%
Jumlah	83	90	173	47,98%	52,02%
Rata-rata	16,6	18	34,6	47,98%	52,02%